

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR SINDANGKASIH KECAMATAN SINDANGKASIH KABUPATEN CIAMIS

Segi Kurnianto

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: Segikurnianto706@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan tarif retribusi pelayanan pasar Sindangkasih. Seperti dalam melakukan sosialisasi kebijakan tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar. Hal ini disebabkan komunikasi antara petugas dan pedagang pasar kurang terjalin dengan baik. Dari permasalahan tersebut, disusunlah masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis? 2). Bagaimana Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis? 3). Bagaimana Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang penulisan gunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi kepada 12 orang yang terdiri dari pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih dan pedagang Pasar Sindangkasih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal, kurangnya petugas dalam memberikan pemahaman yang jelas kepada pedagang, kurangnya ketegasan petugas kepada pedagang dengan tidak menaati setiap kebijakan yang diberikan. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai kepada pedagang, kurangnya ketegasan dari petugas yang dilakukan kepada pedagang. Upaya yang dilakukan terkait Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis yaitu sudah memberikan pemahaman dan pengertian terhadap pedagang terkait dalam pelaksanaannya kebijakan, petugas UPTD untuk turun secara langsung ke lapangan agar dapat mengetahui dari

pembayaran retribusi pelayanan pasar dapat dirasakan oleh pedagang. Adapun saran penulis sampaikan yaitu Sebaiknya pegawai mensosialisasikan segala bentuk ketentuan atau kebijakan kepada pedagang dan untuk pedagang dapat menaati dari suatu kebijakan dengan secara optimal dengan membayar iuran retribusi pelayanan pasar.

Kata Kunci : *Implementasi, Retribusi Pelayanan Pasar*

PENDAHULUAN

Perkembangan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang yang merupakan realisasi dari rencana yang telah di rencanakan dalam program pembangunan nasional.

Dalam melancarkan pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, dalam program pembangunan nasional ditetapkan bahwa pembangunan daerah perlu ditingkatkan. Pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, sehingga pembangunan daerah diarahkan sebagai dasar dari terciptanya pembangunan nasional, karena masyarakat di daerah merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan yang dapat menjamin perkembangan pembangunan

yang dilaksanakan bersama-sama secara sektoral dan regional.

Pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, hasil kekayaan daerah dan lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa Pembayaran Retribusi dibayarkan langsung oleh Wajib Retribusi kepada UPT Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang membidangi pasar di setiap pasar atau ditarik langsung kepada wajib retribusi oleh petugas pemungut dari UPT Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas pemungutan, dan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan cara dicicil setiap harinya atau dibayar tunai.

Berdasarkan observasi penulis menemukan masalah mengenai belum optimalnya pelaksanaan tarif retribusi pelayanan pasar hal ini dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya sosialisasi peraturan tentang penyesuaian.
2. Tarif retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang.
3. Kurang ketegasan petugas administratif dalam melakukan kebijakan wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
4. Kurangnya sumber daya manusia dalam pemungutan retribusi di pasar Sindangkasih.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi

Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Menurut Leo Agustino (2017:139) mengemukakan:

“Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Sedangkan menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012;21) mengemukakan implementasi adalah:

“kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target grup) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”.

1. Pengertian kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh beberapa aktor pembuat kebijakan. Menurut Anderson (1990:3) mendefinisikan kebijakan adalah:

“serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan”.

Sedangkan menurut (Wahab,2004;3) merumuskan kebijakan pemerintah sebagai berikut:

“langkah-langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang

aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”.

2. Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah besaran nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya tarif retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Misalnya retribusi pasar antara kios dan los dan retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 155 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung yang dapat ditunjuk. Menurut Marihot P.Siahaan (2005:6) ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 3 Ayat (1) dan (3) menyatakan :

“Pembayaran Retribusi dibayarkan langsung oleh Wajib Retribusi kepada UPT Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pasar di setiap wilayah pasar atau ditarik langsung kepada wajib retribusi oleh petugas pemungut dari UPT yang telah diberi tugas pemungutan”.

“Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan cara

dicicil setiap harinya atau dibayar tunai”.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2014: 4) yang menyatakan “ Metodologi Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, dimana metode deskriptif analisis menurut Surakhmad (2004:140), “Metode deskriptif analisis merupakan suatu pemecahan deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pelaksanaan metode deskriptif tidak terlepas pada pengumpulan data akan tetapi meliputi analisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut”.

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen, penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan,

dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Menurut pendapat Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih kabupaten Ciamis.

Adapun implementasi kebijakan Model Merilee S. Grindle (2017:142) menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga amat ditentukan oleh tingkat implementasi, yaitu :

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, dengan indikator-Indikator yaitu :
 - a. Adanya kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan.
 - b. Adanya informasi kebijakan yang disampaikan secara jelas oleh petugas kepada para pedagang.
 - c. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
2. Tipe manfaat, dengan indikator-indikator :
 - a. Adanya manfaat dalam suatu kebijakan baik itu untuk para pedagang maupun pemerintah.

- b. Adanya dampak positif yang dihasilkan dari suatu pelaksanaan kebijakan.
 - c. Adanya penerapan suatu kebijakan.
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai, dengan indikator :
- a. Adanya target yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kebijakan.
 - b. Adanya perubahan yang ingin dicapai melalui suatu kebijakan
 - c. Adanya petunjuk-petunjuk secara jelas bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya.
4. Letak pengambilan keputusan, dengan indikator-indikator :
- a. Memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
 - b. Adanya kejelasan dan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan.
 - c. Adanya kebijakan yang akan diterapkan.
5. Pelaksanaan program, dengan indikator-indikator :
- a. Adanya pelaksanaan kebijakan yang harus didukung agar dapat dilaksanakan dengan baik.
 - b. Adanya kebijakan yang terampil dan mampu demi keberhasilan suatu kebijakan.
 - c. Adanya data yang jelas yang diterima oleh para pelaksana kebijakan supaya tidak membingungkan.
6. Sumber Daya yang digunakan, dengan indikator sebagai berikut :
- a. Memiliki sumber daya utama yang mendukung berjalannya suatu kebijakan.

- b. Adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola suatu kebijakan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa ungkapan, kata-kata, dan kalimat. Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan (Moleong 2010:125-126).

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari

seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti (Deddy, 2004:195). Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen, 1982 dalam Moleong(2014:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Glaser dan Strauss, yaitu :

1. Reduksi Data

- a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.

- b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap 'satuan' agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya.

2. Kategorisasi

- a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
- b. Setiap kategori diberi nama yang disebut 'label'.

3. Sintesisasi

- a. Mensintesisasikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
- b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.

4. Menyusun 'Hipotesis Kerja'

Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proporsional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori *substantif* (yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang ditemukan terkait dengan Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan petugas kepada pedagang yang

dibuktikan dengan tidak menaati setiap kebijakan yang diberikan, terdapat pedagang yang masih merasa kurang memahami dan pelaksanaannya setiap kebijakan dari pemerintah, kurangnya dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh para pegawai sehingga masih banyak pedagang yang belum mengetahui informasi terkait dengan kebijakan tentang retribusi pelayanan pasar, jaranganya pimpinan dari UPTD yang turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi pasar Sindangkasih yang menyebabkan kurang terpeliharanya kondisi yang sebenarnya, berusaha untuk melakukan pembinaan mental terhadap para pegawai agar lebih matang dan dewasa sehingga mampu untuk melakukan komunikasi dengan pedagang, memberikan pemahaman dan pengertian terhadap para pedagang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal. Dikarenakan belum dilaksanakannya syarat-syarat pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan seperti kurangnya petugas dalam memberikan pemahaman yang jelas kepada pedagang, kurangnya ketegasan petugas kepada

pedagang yang dibuktikan dengan tidak menaati setiap kebijakan yang diberikan.

Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis yaitu seperti kurangnya dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh para pegawai, kurangnya ketegasan dari petugas yang dilakukan kepada pedagang secara langsung agar kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik serta tepat untuk mencapai tujuan bersama.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti bahwa sudah memberikan pemahaman dan pengertian terhadap para pedagang terkait dalam pelaksanaannya dapat menjadi pemahaman, Petugas UPTD untuk sering turun secara langsung ke lapangan agar dapat mengetahui yang sudah dan belum dilaksanakan dari pembayaran retribusi pelayanan pasar dapat dirasakan oleh pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

- Marihot Pahala Siahaan, (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- Leo Agustino, (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.

- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Solichin Abdul Wahab. (2014). *Analisis kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Kirk dan Miller dalam Moleong, Lexy J. (1986). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Surakhmad. Winarno. (2004). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung : Tarsito.
- Mulyana Deddy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Supranto. (2007). *Teknik Sampling untuk Survey dan Eksperimen*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Patton. (1980). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Bogdan dan Taylor dalam J.Moleong, Lexy. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.
- Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Presindo.
- Mazmanian and Sabatier. 1993. *Implementation and Public Policy* Glenview, III : Scot, Foresman.
- William dan Elmore yang dikutip oleh Sunggono (2004;139), mengemukakan
- Wibawa (2002), memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan